

**STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM PEMENANGAN PASANGAN ZULMI
ELDIN DAN AKHYAR NASUTION PADA PILKADA KOTA MEDAN TAHUN 2015**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

DISUSUN

OLEH :

NAMA : ADAM MUCHSIN SIREGAR

NIM : 12.851.0055



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

2016

**STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM PEMENANGAN PASANGAN ZULMI
ELDIN DAN AKHYAR NASUTION PADA PILKADA KOTA MEDAN TAHUN 2015**

SKRIPSI

NAMA : ADAM MUCHSIN SIREGAR

NPM : 12.851.0055



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pasangan
Zulmi Eldin dan Akhayar Nasution Pada Pilkada Kota
Medan Tahun 2015.

Nama Mahasiswa : Adam Muchsin Siregar

NIM : 12.851.0055

Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing I

Drs. Irwan Nasution, SPd. MAP

Pembimbing II

Mengetahui

Prof. Dr. Drs. M. Arif Nasution, MA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI
DAN SUMBER INFORMASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adam Muchsin Siregar

Nim : 12.851.0055

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pasangan Zulmi Eldin dan Akhayar Nasution Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015.”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan, 2016

Adam Muchsin Siregar

Nim:12.851.0055

ABSTRAK

Pemilu saat ini semakin menuju arah yang lebih baik lagi demi mewujudkan bangsa yang lebih terarah dan lebih baik lagi . Demokrasi adalah suatu landasan yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan dilakukan 5 (lima) tahun sekali secara berkala dan semua ketentuan tetap ditangan rakyat. Dalam suatu organisasi, berbagai pihak yang sesungguhnya beragam dapat dikonsolidasikan dalam satu front. Keberadaan organisasi membuat aspirasi kolektif sekelompok masyarakat menjadi lebih kuat posisinya dalam menghadapi kepentingan kelompok yang berseberangan. Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju,modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.Quick Count yang dilakukan lembaga survei Indobarometer misalnya, dari sampel surat suara yang masuk pasangan Eldin-Akhyar menang dengan perolehan suara 72.32% suara dementara Ramadhan Pohan – Eddie Kusuma 27.68%. dan akhirnya pilkada sumut dimenangkan oleh pasangan Zulmi eldin dan Akhyar nasution dengan perolehan nilai yang sudah dihitung resmi oleh KPU dan diumumkan ketua KPU Medan yaitu Yenni Chairiah dengan perolehan suara 346.406 suara dengan perbandingan dengan lawannya yaitu Ramadhan Pohan dan Eddie kusuma dengan perolehan suara sebesar 136.608 suara. Keputusan hasil pilkada ini berdasarkan rekapitulasi hasil pemungutan suara 21 kecamatan kota Medan.Strategi kampanye pemenangan yang di susun oleh tim pemenangan pasangan kandidat Zulmi Eldin dan Akhayar Nasution dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Strategi dalam kampanye pilkada meliputi tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kata Kunci :Strategi Partai Golkar, Pemenangan Eldin dan Akhayar, Pilkada kota Medan

ABSTRAK

Election today's increasingly towards a better direction again in order to realize a nation that is more focused and better. Democracy is a foundation that is of the people, by the people and for the people. The election was conducted five (5) years on a regular basis and all conditions remain the people's hands. In an organization, the various parties, in reality, can be consolidated in a single front. The existence of the group of people make collective aspiration to become stronger position in the face of the opposing group interests. Party Golkar struggle for the realization of Indonesia advanced new, modern, united, peaceful, just and prosperous society that is faithful and devoted, berahlak well, uphold human rights, patriotism, democratic, and fair in order of civil society is independent, open, egalitarian, legal and environmental conscious, master of science and technology, has the work ethic and the spirit of the workmanship, as well as discipline tinggi. Quick Count conducted the survey agency Indobarometer for example, of the sample ballot that incoming partner-Akhyar Eldin won by a vote 72.32% of the vote dementara Ramadhan Pohan - Eddie Kusuma 27.68%. and finally the elections sumut won by Zulmi Eldin and Akhyar nasution with the acquisition value has been calculated authorized by the Commission and announced KPU chairman Medan is Yenni Chairiah by a vote of 346 406 sound by comparison with his opponent that Ramadhan Pohan and Eddie kusuma by a vote of 136 608 voices , The decision was based on the election results from the recapitulation of the 21 voting districts Medan.Strategi city winning campaign were collated by the winning team mate Zulmi candidate Eldin and Akhayar Nasution can be categorized run well. Strategies in covering the election campaign stages: planning, implementation and evaluation.

Keywords: Strategy Golkar Party, Eldin and Akhayar Winning, Election Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Strategi Partai Golkar Pemenangan Pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Pispol Universitas Medan Area.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala-kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya :

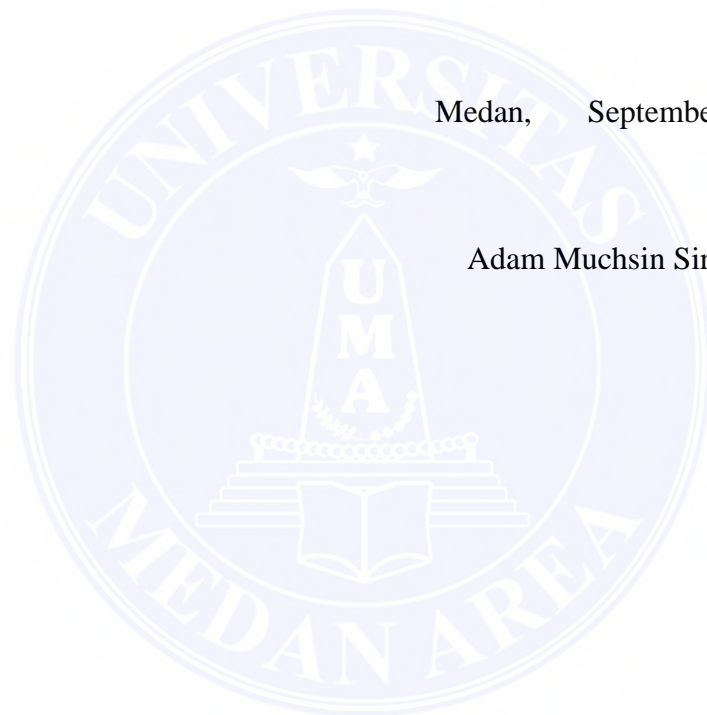
1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr, H. M. Arief Nst .MA selaku dekan Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan arahan, motivasi, serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Irwan Nasution, Spd, M.ap selaku dosen pembimbing II penulis. Yang memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Yurial Lubis, S.Sos, M.ip selaku sekretaris.
6. Manajemen kantor DPD partai Golkar Sumatera Utara yang sudah membantu saya dalam penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi kasih sayang, do'a dan semangat yang tiada ada hentinya baik material maupun spiritual kepada putranya ini agar senantiasa berjuang meraih mimpi.
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Medan Area.

9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas ISIPOL, atas bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna baik dalam penulisan maupun isi disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun diri pembaca untuk kesempurnaan isi skripsi ini.

Medan, September 2016

Adam Muchsin Siregar



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

| | |
|----------------------------|------------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 5 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 6 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2.1 Kerangka Teoritis..... | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Strategi..... | 8 |
| 2.1.2 Unsur-unsur Strategi..... | 9 |
| 2.1.3 Tahapan Strategi..... | 10 |
| 2.2 Pengertian kampanye | 11 |
| 2.2.1 Kampanye Public Relation..... | 11 |
| 2.2.2 Manajemen Public Relation..... | 14 |
| 2.2.3 Perencanaan kampanye..... | 15 |
| 2.2.4 Pelaksanaan kampanye..... | 16 |
| 2.2.5 Evaluasi kampanye..... | 17 |

| | |
|--|----|
| 2.3 Partai politik | 18 |
| 2.3.1 Pengertian Partai Politik | 18 |
| 2.3.2 Fungsi dan tujuan partai politik..... | 19 |
| 2.3.3 Pengklasifikasian Partai Politik | 20 |
| 2.4 Pengertian KPU | 21 |
| 2.5 Pengertian Pemilu | 21 |
| 2.6 Pemilihan Kepala Daerah | 23 |
| 2.7 Partai Golkar | 24 |
| 2.7.1 Sejarah Partai Golkar (GOLKAR) | 24 |
| 2.7.2 Visi Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 29 |
| 2.7.3 Misi Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 30 |
| 2.7.4 Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban Partai Golongan Karya (GOLKAR)..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 38 |
| 3.1.1 Pendekatan Penelitian..... | 38 |
| 3.1.2 Lokasi & Waktu Penelitian..... | 38 |
| 3.2 Sumber Data Penelitian | 39 |
| 3.2 Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| 3.3 Teknik Analisa Data | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Partai | 42 |
| 4.1.1 Ideologi Partai Golkar | 46 |
| 4.1.2 Arah Ideologi Politik Partai Golkar | 48 |
| 4.1.3 Paradigma Baru Partai Golkar | 51 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.4 Doktrin Perjuangan Partai Golkar | 53 |
| 4.1.5 Visi dan Misi Parati Golkar | 54 |
| 4.2 Penelitian | 55 |
| 4.2.1 Perencanaan Analisis SWAT | 55 |
| 4.2.2 Pelaksanaan Kampanye | 56 |
| 4.2.3 Evaluasi | 57 |
| 4.2.4 Peran dan Strategi Partai | 58 |
| 4.2.5 Kemampuan Partai dalam Mengarahkan Pemilih | 58 |
| 4.2.6 Organisasi Sayap di Seputar Pilkada | 59 |
| 4.2.7 Meraih Simpati Masyarakat Pemilih | 59 |
| 4.2.8 Evaluasi Program | 60 |
| 4.2.9Membuat Opini Publik | 62 |
| 4.2.10 Pemenangan Pasangan Walikota | 62 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan | 63 |
| 5.2 Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan kemudian direvisi berbagai penjelasannya oleh PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena banyaknya kejanggalan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam kurun waktu satu atau dua dekade lalu seolah hanya sebuah impian, saat ini telah menjadi kenyataan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan keberhasilan dan kemajuan bagi sistem demokratisasi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya dari berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlampaui mendominasi dan bahkan terkesan.

Dalam pemilu dan pilkada suatu strategi kampanye sangat dibutuhkan, misalnya apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah massa pemilihnya. Dalam hal ini harus ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik akan dapat berhasil.

Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Perluasan pasar tidak mungkin dapat dicapai dengan isu atau agenda yang tidak bermutu.

Strategi kampanye merupakan suatu strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas

pemerintah. Dalam kasus semacam ini, partai akan memelihara pemilih tetap mereka, dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung. Partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai-partai yang menerapkan strategi defensif.

Pemilu saat ini semakin menuju arah yang lebih baik lagi demi mewujudkan bangsa yang lebih terarah dan lebih baik lagi. Salah satu pemilu yang telah kita laksanakan ialah pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan diseluruh provinsi Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. PILKADA kali ini adalah PILKADA periode 2015-2020.

Salah satu kota di Indonesia yang melakukan PILKADA serentak adalah kota Medan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan telah menggelar penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil tahun 2015 bertempat di Hotel Darma Deli, Medan, Selasa (25/8). Adapun urutan pasangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution yang diusung oleh partai PDI-P, Golkar, Pan, Nasdem, PBB, PKPI dan Partai PKS.
2. Pasangan Ramadhan Pohan-Eddie yang diusung oleh partai Gerindra dan Hanura dan Demokrat.

Kedua pasangan diatas harus mampu merebut hati masyarakat Medan, agar memberikan suaranya kepada mereka dengan melakukan strategi untuk kampanye secara maksimal dimana dengan tujuan untuk memenangkan PILKADA kali ini. Kampanye secara maksimal itu dilakukan dapat dilakukan kedua pasangan mulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 05 Desember 2015.

Dalam PILKADA tahun 2015 banyak mengalami perubahan yang sangat kompleks sehingga persaingan antar pasangan calon pun semakin kompleks dimana partai pendukung

masing-masing calon harus mampu memenangkan pasangan yang dicalonkan dari partainya, harus mampu memberikan keyakinan terhadap masyarakat bahwasanya calon yang mereka unggulkan mampu merubah SUMUT menjadi lebih baik lagi, sehingga masyarakat dapat dengan yakin untuk memilih pasangan yang mereka calonkan.

Jadi, masing-masing partai pendukung harus mampu membuat pola jaringan untuk memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Adapun yang dilakukan oleh para pendukung calon dari masing-masing partai adalah kampanye. Kampanye adalah bagian yang *inheren* dari kegiatan pemilu dan pilkada langsung. Karena itu kampanye harus direncanakan, dibuat strategi dan teknik baik yang menyangkut materi kampanye maupun model kampanye. Persaingan antar kubu fraksi pendukung calon wali kota dan wakil wali kota sangat sengit dimana salah satu calon yaitu Dzulmi Eldin – Akhyar Nasution diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrat (NasDem), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti yang kita ketahui partai-partai yang mendukung Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution merupakan partai-partai yang sangat kuat yang.

Sementara itu pasangan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma diusung oleh Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dua partai politik yakni PKB dan PPP masing-masing belum memperlihatkan dukungannya karena PKB tidak memiliki kursi di DPRD Medan, sementara PPP masih berpolemik dengan dua kubu kepemimpinan mereka. Kampanye terbuka dimulai 27 Agustus 2015 sampai 5 Desember 2015. Dalam pemilihan media kampanye, media massa masih menjadi favorit. Mulai dari baliho, media cetak, radio dan televisi. Tidak ketinggalan juga media baru internet. Facebook yang sedang dikalangan anak muda ikut dimanfaatkan.

Strategi dalam kampanye pilkada meliputi tahap yaitu menelaah sumber data, reduksi data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Momentum demokrasi dengan program sarannya melalui pemilihan langsung melahirkan dan menjadikan rakyat sebagai kunci kemenangan kandidat. Dengan visi misi dan program-program yang menarik masyarakat. Sarana yang paling efektif adalah sosialisasi. Bisa melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Quick Count yang dilakukan lembaga survei Indobarometer misalnya, dari sampel surat suara yang masuk pasangan Eldin-Akhyar menang dengan perolehan suara 72.32% suara dementara Ramadhan Pohan – Eddie Kusuma 27.68%.

Terlebih melalui media audio visual dan akhirnya pilkada Medan dimenangkan oleh pasangan Zulmi eldin dan Akhyar nasution dengan perolehan nilai yang sudah dihitung resmi oleh KPU dan diumumkan ketua KPU Medan yaitu Yenni Chairiah dengan perolehan suara 346.406 suara dengan perbandingan dengan lawannya yaitu Ramadhan Pohan dan Eddie kusuma dengan perolehan suara sebesar 136.608 suara. Keputusan hasil pilkada ini berdasarkan rekapitulasi hasil pemungutan suara 21 kecamatan kota Medan.

Jadi, dalam penelitian ini menarik untuk dikaji tentang strategi partai golkar dalam pemenangan pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution pada pemenangan pilkada 2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Adanya strategi kampanye yang dilakukan calon walikota dan wakil walikota Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution dalam menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2015.
- b. Adanya peran partai pendukung pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution dalam menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2015.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini agar terarah dan tidak terlalu meluas maka penulis membatasi masalahnya hanya pada strategi kampanye partai GOLKAR yang digunakan untuk pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution dalam memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2015

1.4 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan pokok dalam uraian diatas maka ada beberapa permasalahan pokok yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi kampanye partai GOLKAR dalam pemenangan pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2015 ?
2. Bagaimana Peran Partai GOLKAR dalam pemenangan pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2015 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi kampanye partai GOLKAR yang dilakukan pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution yang merupakan calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2015.

2. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan partai GOLKAR dalam pemenangan pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar yang merupakan calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2015.

b) Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, khususnya untuk mengetahui strategi kampanye yang paling efektif yang akan dilakukan oleh Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution yang merupakan pemenang pilkada 2015.
- b. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan baik dalam penerapan teori maupun praktek di lapangan dan mengetahui sistem persiapan yang dilakukan DPD dalam Pilkada 2015.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Pengertian Strategi

Untuk mencapai suatu goal (tujuan) pastinya kita harus menyusun strategi apa saja yang akan kita lakukan, karena pada dasarnya strategi merupakan suatu alat yang mempermudah kita untuk dapat mencapai suatu tujuan. Menurut (Rangkuti, 2009,), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Menurut Mintzberg (2007), konsep strategi itu sekarang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Menurut Hamel dan Pharalad (Rangkuti,2004:4) mendefinisikan bahwasanya strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya strategi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan tersusun secara sistematis serta mampu memprediksi apa yang akan terjadi nantinya baik dari internal maupun eksternal.

2.1.2 Unsur-unsur strategi

Menurut Boyd (2000:29), terdapat lima unsur atau himpunan dalam strategi yang dikembangkan dengan baik :

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup organisasi mengacu kepada keluasan dari sasaran strateginya, jumlah dan segmen pasar dimana bersaing atau direncanakan untuk masuk.

2. Tujuan dan sasaran.

Strategi harusnya merinci tingkat perincian yang diinginkan pada satu atau lebih dimensi kinerja.

3. Pengalokasian sumber daya.

Setiap organisasi memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang terbatas. Merumuskan strategi juga melibatkan keputusan bagaimana sumber daya itu dicapai dan dialokasikan.

4. Identifikasi keunggulan kompetitif yang layak.

Satu bagian yang penting dari strategi apapun adalah spesifikasi dari bagaimana organisasi akan bersaing dalam setiap unit bisnis.

5. Sinergi.

Sinergi muncul bila unit bisnis, produk-produk, pengalokasian sumber daya dan kompetensi perusahaan saling melengkapi dan saling menguatkan sama lain.

2.1.3 Tahapan Strategi

Adapun tahapan dalam strategi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Strategi

Sebelum menyusun strategi yang harus dilakukan, adapun langkah awal yang harus diperhatikan adalah dengan cara merumuskan strategi atau menyusun langkah awal. Dalam merumuskan strategi didalamnya sudah termasuk yaitu pembangunan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategis untuk dilaksanakan.

2. Implementasi Strategi

Apabila kita telah melakukan penyusunan strategi, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

3. Evaluasi strategi

Setelah kita melakukan implementasi strategi, langkah selanjutnya adalah evaluasi strategi dimana evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah strategi yang kita susun memiliki pengaruh yang baik atau apakah strategi yang kita susun dapat mencapai tujuan yang sesuai kita inginkan. Ada tiga hal mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu :

a) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar .

- b) Mengukur prestasi, maksudnya adalah membandingkan hasil dengan kenyataan yang terjadi). Prosesnya dapat dilakukan dengan menyelidiki penyimpangan dari rencana, ,mengevaluasi prestasi individual atau menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran.
- c) Mengambil tindakan korektif, maksudnya adalah memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana, dalam hal ini tidak berarti strategi yang lama ditinggalkan dengan susunan straregi yang baru.

2.2 Pengertian Kampanye

2.2.1 Kampanye *Public Relation*

Rogres dan Storey dalam tulisannnya *comunication campaigns* mendefinisikan kampanye secara umum sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana denga tujuan mencciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye PR (*Public Relation*) dalam arti sempit bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (*target audience*) untuk merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi (*comporate activities*) agar tercipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat melalui penyampaian pesan secara intensif dengan proses komunikasi dan jangka waktu tertentu yang berkelanjutan.

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” (Venus, 2004:7). Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang

diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi (Grossberg, 1998; Snyder, 2002; Klingemann & Rommele, 2002). Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kampanye merupakan sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye *elektoral* pencapaian dukungan, dimana wakil terpilih atau referenda diputuskan.

Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Rogers dan Storey kampanye diartikan sebagai, “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”. Bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh para kandidatpun beragam, mulai dari kampanye negatif hingga ke kampanye hitam. Dalam arti lebih maupun luas kampanye PR tersebut memberikan penenrangan terus-menerus serta pengertian dan motivasi masyarakat terhadap suatu kegiatan atau program tertentu melalui proses dan teknik

komunikasi yang berkesinambungan dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif.

Dalam peran atau praktik lapangan *public relation* sehari-hari bahwa kampanye tersebut telah berbeda pengertiannya dengan propaganda. Melakukan kampanye PR di sini lebih menitik beratkan untuk membangun suatu pengertian dan pemahaman (*soft selling*) melalui persuasi dari khalayak sasaran. Sedangkan propaganda, selain bertujuan untuk mencari pengikut atau dukungan, juga untuk membangun suatu pengertian dari khalayak sasaran, tetapi lebih menitik beratkan unsur “paksaan” (*hard selling*) disamping melakukan persuasi. Keduanya sama aktivitasnya dalam penyempatan pesan atau isu melalui proses berkomunikasi dengan menggunakan media massa dan media non massa.

Proses dalam komunikasi merupakan interaksi antar manusia yang berujuan untuk menumbuhkan suatu pengertian antara komunikator (penyebarnya) dengan komunikan (penerima pesan). Jadi, komunikasi yang efektif terjadi bila antara komunikator dengan komunikan saling tercipta suatu pengertian yang sama tentang pesan yang disampaikan tersebut.

2.2.2 Manajemen Kampanye *Public Relation*

Kampanye pada hakikatnya adalah tindakan komunikasi yang bersifat *goal oriented*. Pada kegiatan kampanye selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Begitu pada dalam kegiatan kampanye PR . pencapaian tersebut tentu saja membutuhkan suatu aturan atau tindakan secara sistematis dan *streghts*.

Dalam kaitan ini Johnson-Cartee dan Copeland menyebut kampanye *an organized behaviour*, harus direncanakan dan diterapkan secara sistematis dan berhati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye dan membutuhkan sentuhan manajemen yakni

kemampuan merancang, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi suatu program kegiatan secara *rasional, realistis, efisien, dan efektif*.

Praktek manajemen dalam kampanye PR bukanlah hal baru. Sejak awal, kegiatan kampanye ini selalu meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Perbedaannya adalah pada masa kini sebagai tahapan tersebut dibakukan dan diformalkan dengan istilah “Manajemen kampanye” yakni proses pengelolaan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dimasukkannya unsur manajerial dalam pengelolaan kampanye diharapkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan kampanye menjadi lebih terbuka dan lebih besar.

2.2.3 Perencanaan Kampanye

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilakukan agar kampanye PR mencapai tujuan yang diinginkan. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa sebuah perencanaan harus dilakukan dalam kampanye PR yaitu :

- (1) Memfokuskan usaha
- (2) Perencanaan membuat tim kampanye dapat mengidentifikasi dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan benar hingga akhirnya pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- (3) Memperbaiki efektifitas

Dengan adanya perencanaan maka akan bekerja untuk tujuan yang telah direncanakan sehingga membuat kita memiliki target yang hendak dicapai dan merasa senang ketika target tersebut berhasil dicapai.

(4) Memacu pandangan jangka panjang

Perencanaan membuat tim kampanye tidak berfikir mengenal efek kampanye dalam jangka waktu yang pendek tapi juga ke masa depan, hingga mendorong dihasilkannya program yang terstruktur dalam menghadapi kebutuhan masa depan.

(5) Mengurangi kesalahan

Perencanaan yang cermat dan teliti akan menghasilkan alur serta tahapan kerja yang jelas, terukur dan spesifik serta lengkap dengan langkah-langkah alternatif, sehingga bila ada kegagalan bisa langsung diambil alternatif penyelesaian.

(6) Menyelesaikan tindakan yang produktif

Sebuah rencana yang matang akan memunculkan rasa percaya para pendukung potensial serta media yang akan digunakan sebahai saluran kampanye, hingga pada akhirnya akan terjalin kerjasama yang baik dan lancar.

2.2.4 Pelaksanaan Kampanye

Menurut Venus pelaksanaan kampanye adalah penerapan dari konstruksi rancangan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena sifatnya yang demikian maka proses pelaksanaan harus segera konsisten berpedoman kepada rancangan yang ada tanpa menngabaikan penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kenyataan lapangan yang dihadapi.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan meliputi :

(1) Realisasi unsur-unsur kampanye

Kegiatan ini meliputi : perekrutan dan pelatihan personel kampanye PR, mengonstruksi pesan, menyeleksi pesan kampanye PR dan menyeleksi saluran kampanye.

(2) Menguji coba rencana kampanye

Uji coba terhadap suatu rancangan dilakukan untuk menyusun strategi (pesan, media, dan penyampai pesan) yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

(3) Tindakan dan pemantauan kampanye

Harus dipahami bahwa tindakan kampanye bukanlah tindakan kaku dan parsial, tetapi bersifat adaptif (penyesuaian), antisipatif (cepat tanggap), integratif (pemersatu) dan berorientasi pada pemecahan masalah.

2.2.5 Evaluasi kampanye

Evaluasi kampanye diartikan sebagai upaya sistematis untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kampanye. Adapun beberapa alasan mengapa harus dilakukannya evaluasi kampanye ialah sebagai berikut :

(1) Memfokuskan usaha

Pengukuran yang telah disepakati akan memfokuskan diri pada hal-hal yang penting dan meletakkan hal-hal sekunder dalam pengawasan.

(2) Menunjukkan keefektifan.

Jika telah berhasil mencapai apa yang telah ditetapkan akan menunjukkan kredibilitas usaha.

(3) Memastikan efisiensi biaya

Gunakan anggaran dan waktu (yang juga berarti uang) untuk hal-hal yang berarti dan memberikan hasil yang maksimal.

(4) Mendukung manajemen yang baik.

Manajemen berdasarkan tujuan dengan sasaran yang jelas akan memberikan ketajaman pada keseluruhan operasi kegiatan kampanye PR.

(5) Memfasilitasi pertanggung jawaban.

Menyediakan hasil yang baik adalah tanggung jawab seorang *public relation*.

2.3 Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Menurut Asshiddiqie (2006), berorganisasi merupakan suatu persyaratan dari suatu perjuangan politik. Dalam suatu organisasi, berbagai pihak yang sesungguhnya beragam dapat dikonsolidasikan dalam satu *front*. Kesberadaan organisasi membuat aspirasi kolektif sekelompok masyarakat menjadi lebih kuat posisinya dalam menghadapi kepentingan kelompok yang berseberangan. Prinsip inilah yang menjadi dasar pendapat mengapa partai politik memiliki peran penting dalam proses dinamika perkembangan demokrasi. Proses pelebagaan organisasi partai politik sebagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri.

Menurut Asshiddiqie (2006), partai politik adalah suatu bentuk pelebagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Jadi, partai politik dapat diartikan sebagai media aspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dalam kehidupan bernegara.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2006 pasal 1, definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

2.3.2 Fungsi dan tujuan partai politik

Menurut Budiardjo (2003), ada empat fungsi partai politik yaitu :

- a) Sarana komunikasi politik dimana partai politik bertugas untuk menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpang siuran pendapat dimasyarakat.
- b) Sarana sosialisasi politik dimana partai politik dalam usahanya memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum.
- c) Sarana rekrutmen dimana partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut.
- d) Sarana mengelola konflik dimana partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul dimasyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi.

Partai politik didirikan bukan tanpa tujuan, adapun tujuan partai politik itu didirikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dipemerintahan.
2. Memperjuangkan cit-cita partai politik dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat khususnya berdasarkan ideologi tertentu.

Menurut Ramlan Surbakti (2006:106), tujuan partai politik adalah mewujudkan kadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan kehidupan secara demokrasi berdasarkan UUD 1945.

2.3.3 Pengklasifikasian partai politik

Pengklasifikasian partai politik dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu sebagai berikut. :

a) Dilihat dari segi jumlah dan fungsi anggotanya dapat dibagi atas :

- (1) Partai massa yaitu partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.
- (2) Partai kader yaitu partai yang mementingkan loyalitas dan kedisiplinan anggota-anggotanya.

b) Dilihat dari segi sifat dan orientasinya, partai politik dibagi dua :

- (1) Partai lindungan yaitu partai yang lebih mementingkan dukungan dan kesetiaan anggotanya terutama dalam pemilu.
- (2) Partai asas atau ideologi yaitu partai yang program-programnya atas dasar ideologi tertentu.

c) Sistem partai politik

Adapun sistem partai politik dapat dibagi atas :

- a) Sistem satu partai. Istilah sistem satu partai ini dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lainnya.

- b) Sistem dwi partai diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai, tetapi dengan peranan dominan dari dua partai.
- c) Sistem multipartai, sistem ini dianggap lebih mencerminkan keaneka ragaman budaya dan politik daripada pola dwi partai.

2.4 Pengertian KPU

KPU (komisi pemilihan umum) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden beserta wakil, serta Pemilihan Umum Kepala daerah beserta wakil.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” Mendefinisikan KPU adalah suatu lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan presiden beserta wakil dan kepala daerah beserta wakil. KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya dicantumkan dan diberikan oleh UUD 1945 pada pasal 22 E yaitu Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.(Asshiddiqie,2006:236-239).

Komisi pemilihan umum secara hierarki termasuk dalam kategori *auxiliary state body* yaitu penunjang atas lembaga negara utama dimana juga termasuk dalam kategori *auxiliary state organ* yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara.

2.5 Pengertian Pemilu

Pengertian Pemilu (pemilihan umum) adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas

terbanyak. Walaupun setiap warga Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta didalam pemilihan umum.

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia maksudnya adalah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya. Pemilihan umum juga diadakan secara bebas dimana bebas ini maksudnya adalah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih didalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapapun atau apapun juga.

Adapun tujuan dari pemilu ialah :

1. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk didalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan.
2. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI.
3. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara republik indonesia yaitu pancasila.
4. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI.

Selain tujuan, pemilu juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sandi-sandi demokrasi.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan maksmur bberdasarkan pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
- c. Menjamin suksesnya perjjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.6 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah gubernur, bupati dan wali kota. Pemilihan pimpinan daerah secara langsung oleh rakyat dalam suatu daerah disebut PILKADA. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pilukada dilakukan secaratif setempat yang langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta walikota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. Sedangkan khusus unyuk daerah Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.

Dalam penyelenggaraan PILKADA telah diatur dalam undang-undang berikut adalah dasar hukum penyelenggaraan PILKADA yang antara lain :

1. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintah Daerah.
3. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU No.3 Tahun 2005.

Dalam PILKADA juga ada tahap-tahap yg perlu ditempuh. Berikut tahapannya:

- a) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini ditulis 5 bulan sebelum masa jabatan terakhir.
- b) Pemberitahuan DPRD kepada ke KPUD tentang berakhirnya jabatan kepala daerah.
- c) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan pilkada.
- d) Pembentukan panitia pengawas KPK,PPS dan KPPS.
- e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

2.7 Partai Golkar (GOLKAR)

2.7.1 Sejarah Partai Golkar (GOLKAR)

Sejarah Partai Golongan Karya (GOLKAR) bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLKAR di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. SEKBER GOLKAR didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya.

SEKBER GOLKAR didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. SEKBER GOLKAR ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. SEKBER GOLKAR ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama SEKBER GOLKAR adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965. Jumlah anggota SEKBER GOLKAR ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota SEKBER GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional SEKBER GOLKAR adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam SEKBER GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaanannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari SEKBER GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta

Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, SEKBER GOLKAR ikut serta menjadi salah satu kontestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara.

Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971.

SEKBER GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan diri bukan partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih 55 sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah Peristiwa G30S maka SEKBER GOLKAR, dengan dukungan sepenuhnya dari

Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya GOLKAR dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan GOLKAR. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader GOLKAR. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap GOLKAR lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu GOLKAR yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemenang. Kemenangan GOLKAR selalu diukur dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa.

Hal ini kemudian berimbas pada GOLKAR. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka GOLKAR juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu GOLKAR dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR. Saat itu GOLKAR juga mengusung citra sebagai GOLKAR baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan GOLKAR dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum GOLKAR yang

cukup legendaris. Partai GOLKAR kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai.

Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai GOLKAR mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pada pemilu berikutnya GOLKAR kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 GOLKAR menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai GOLKAR kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa GOLKAR memenangkan pemilu. Dia menargetkan GOLKAR menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum GOLKAR dari masa ke masa :

1. Djuhartono (1964-1969)
2. Suprpto Sukowati (1969–1973)
3. Amir Moertono (1973–1983)
4. Sudharmono (1983–1988)
5. Wahono (1988–1993)
6. Harmoko (1993–1998)
7. Akbar Tandjung (1998–2004)
8. Jusuf Kalla (2004–2009)
9. Aburizal Bakrie (2009–sekarang)

2.7.2 Visi Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya. Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

2.7.3 Misi Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat

yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik.

2.7.4 Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban Partai Golongan

Karya (GOLKAR)

Struktur Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif yang memiliki wewenang :

1. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan
3. Daerah Provinsi Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

4. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .

Dewan Pimpinan Pusat selain memiliki wewenang juga memiliki kewajiban, kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Nasional.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi yang memiliki wewenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi memiliki kewajiban:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.

c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan.

Sedangkan kewajiban dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pimpinan Kecamatan

Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan. Pimpinan Kecamatan memiliki wewenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.

2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR
3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pimpinan Kecamatan memiliki kewajiban yaitu :

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Kecamatan.

e. Pimpinan Desa/Kelurahan

Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan memiliki wewenang menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR. Sedangkan kewajiban Pimpinan Desa/Kelurahan adalah:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun

tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.

2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.
3. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

f. Badan dan Lembaga Partai GOLKAR

Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai. Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya Jenis Badan- badan yang dibentuk partai GOLKAR antara lain :

1. Badan penelitian dan pengembangan
2. Badan informasi dan komunikasi
3. Badan advokasi hukum, hak asasi manusia dan otonomi daerah
4. Badan pengembangan seni, budaya dan pariwisata

Sedangkan jenis – jenis lembaga yang dibentuk oleh partai GOLKAR yaitu:

1. Lembaga pengelola kaderisasi
2. Lembaga pelatihan profesi masyarakat (LPPM)
3. Lembaga pemenangan pemilu
4. Lembaga pengkajian dan pengembangan ekonomi dan usaha kecil menengah (UKM)

g. Organisasi Sayap Partai GOLKAR

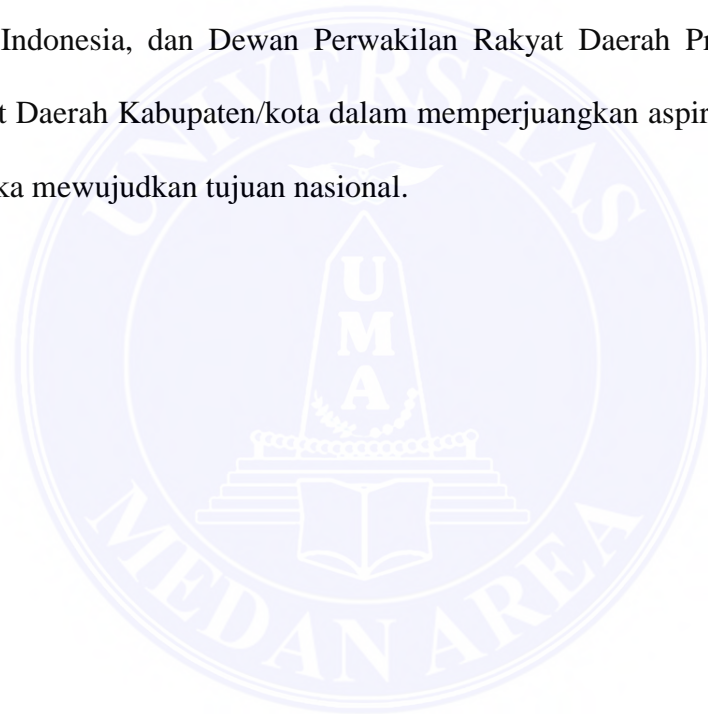
Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai.

Ketua Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Kecamatan (Muscam), dan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (Musdes/Muslur) melalui Tim Formatur. Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan bersama Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

1. Fraksi

Partai GOLKAR memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Fraksi adalah Badan Pelaksana Kebijakan Partai

GOLKAR di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Pendekatan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian ini membahas Strategi Kampanye Dalam Pemenangan Pasangan Zulmi Eldin dan Akhar Nasution Pada Pilkada Walikota di Kota Medan Tahun 2015.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPD Partai Golkar yang beralamat di jalan Jendral Gatot Subroto No: 173-175 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan di bulan Mei 2016 sampai dengan Juli 2016.

3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi

langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretariat Partai Golkar Medan, Anggota Tim Sukses Eldin dan Akhayar.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara mendalam (*dept interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung menggunakan metode key informan Tim Sukses, bertatap muka dengan informan (narasumber) agar dapat mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan secara intensif.

- b. Dokumentasi adalah untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dilaksanakan terkait maksud, tujuan dan manfaat penelitian. Dokumentasi yang dapat dikumpulkan melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi suatu objek penelitian, baik berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.4 Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini tidak diutamakan besarnya jumlah informan. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu lagi mencari informan lainnya.

Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka metode yang dipakai adalah analisa kualitatif, analisa kualitatif itu sendiri terdapat 3 alur kegiatan yang terjadi bersama-sama :

1. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka, maupun sumber lain.
2. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisa kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kesimpulan catatan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2005, *Politik dan Otonomi Daerah*, Untirta Press : Jakarta

Arikunto, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar : Yogya

Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press : Yogyakarta

Firmanzah, 2007, *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta

Homby, AS, 2000, *Oxford Advance Learner's Dictionary*, Oxford University Press : New York

Ibrahim, Herman dan Faisal Siagian, 1999, *Kampanye Tanpa Kekerasan*, Penerbit Biro Humas Depdagri : Jakarta

Katzenbach, Jon R. dan Douglas K. Smith, 1997, *The Wisdom of Team (Kemampuan Tim)*, Profesional Books : Jakarta

Lukmantoro, Triyono, *Politik Representasi dan Rekayasa Citra dalam Arena Pilkada, dalam Seminar Internasional Dinamika Politik lokal di Indonesia:Etika, Politik dan Demokrasi, 2-5 Agustus 2005, Kampoeng Percik Salatiga*

M.Shaw, Chaterine, 2004, *The Campaign Manager : Running and Winning Local Elections – third edition*, Westview Press

Manulang, 2004, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Penerbit Andi : Yogyakarta

Mapilu PWI Jateng, 2008, *Pilgub Jateng 2008*, Pijafrel Mapilu PWI : Semarang

Marbun, BN, 2003, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta

Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Remaja Rosdakarya : Bandung

Nimmo, Dan, 2004, *Komunikasi Politik-Komunikator, Pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya : Bandung

Pradhanawati, Ari, 2007, *Pemilihan Gubernur Gerbang Demokrasi Rakyat*, Jalan Mata : Semarang

Rendra , Widyatama, 2007, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher : Yogyakarta

Sardini, Nur Hidayat, 3 Juli 2005, *Rasionalitas Pilkada : Siapa Menang, Siapa Pecundang?*, Suara Merdeka

Setiyono, Budi dan RTS Masli, 2008, *Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum*, AdGoal Com : Jakarta

Steinberg, Arnold, 1981, *Kampanye Politik*, PT.Intermasa : Jakarta

Stoner, James AF, 1996, *Manajemen*, Erlangga : Jakarta

Supono, Supto, *Peranan Pemerintah Dalam Pilkada dan Potensi Permasalahan Pilkada*, dalam Seminar Nasional *Dilema-dilema Pilkada Langsung*, 2005, Puskodak Undip : Semarang,

, Slamet, 1983, *Sedikit Tentang Strategi Kebudayaan Nasional Indonesia*, Liberty : Yogyakarta